

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Energi mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan serta merupakan pendukung bagi kegiatan ekonomi baik nasional maupun global. Kebutuhan energi suatu negara cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi energi dunia diperkirakan naik 56% pada 2040 didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (International Energy Outlook, 2013:1). Menurut EIA, teknologi energi baru dan terbarukan juga berperan penting dalam perkembangan energi dunia. Pertumbuhan energi baru dan terbarukan dan energi nuklir diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibanding energi dari bahan bakar fosil dalam periode yang sama. Sejumlah penemuan yang lain diantaranya adalah, konsumsi energi dunia naik dari 524 ribu triliun/quadrillion (Btu) pada 2010 menjadi 820 ribu triliun Btu pada 2040. Peningkatan penggunaan energi ini sebagian besar berasal dari negara berkembang yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam jangka panjang. Data EIA menyebutkan bahan bakar fosil akan terus mendominasi pasokan energi di bumi dengan memasok 80% kebutuhan energi dunia hingga 2040.

Pada dasarnya inti permasalahan energi dunia adalah ketidakseimbangan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) serta akses terhadap sumber daya energi. Berbagai faktor yang menciptakan ketidakseimbangan tersebut antara lain adalah pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan masifnya industrialisasi dunia. Hal ini meningkatkan konsumsi energi dunia secara drastis dan mengakibatkan tersedotnya cadangan energi khususnya energi fosil. Diperkirakan hingga tahun 2040 konsumsi energi dunia masih tergantung kepada energi minyak bumi yang tidak terbarukan.

Selain itu dalam lingkup ASEAN, konsumsi energi juga juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. ASEAN telah memiliki lebih dari 520 juta penduduk dan angka ini terus meningkat beberapa persen per tahun. Meningkatnya

permintaan energi mengakibatkan munculnya investasi baru pada bidang produksi energi dan pembangunan infrastruktur guna mengamankan persediaan energi yang memadai dan stabil. Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E Ong Keng Yong menjelaskan bahwa dengan akses yang memadai, energi yang terjangkau telah menjadi elemen penting untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan manusia dan meningkatkan standar hidup (H.E Ong Keng Yong, 2004). Namun kurangnya akses pada energi yang berkelanjutan dan modern merupakan penyebab utama dari kerusakan lingkungan disebagian besar kawasan dunia berkembang, dan menjadi hambatan utama dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya ASEAN harus mengurangi tingginya konsumsi energi impor, khususnya minyak.

Salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi ialah harga minyak yang tinggi dan dapat merusak ekonomi ekspor. Hal ini akan langsung berdampak pada meningkatnya inflasi dan biaya produksi, selain menyebabkan ketidakstabilan pasar finansial dan memperburuk perlambatan ekonomi di negara ekonomi utama. Pada dasarnya, energi fosil yang selalu menjadi andalan untuk dikelola atau dimanfaatkan ialah minyak, gas alam dan batu bara. Namun sebagai pengganti bahan bakar minyak, gas alam digunakan sebagai energi alternatif terutama dalam mematuhi kebijakan nasional dan global yang lebih ketat terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Energi gas memiliki kepentingan dalam mendukung energi. Beberapa diantaranya gas memiliki beberapa pemanfaatan yang dapat dirasakan dalam mendukung energi. Secara garis besar, pemanfaatan gas bumi dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, gas bumi sebagai bahan bakar. Sebagai sumber energi, gas bumi digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri ringan, menengah dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor, hingga bahan bakar rumah tangga. Kelompok kedua, gas bumi sebagai bahan baku. Selain sumber energi, gas bumi dimanfaatkan sebagai bahan baku beberapa produk seperti pupuk, petrokimia, methanol dan plastik. Sementara,

kelompok ketiga adalah gas bumi sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG¹. (Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014-2030; 35).

Asia Tenggara mengandung kekayaan gas alam yang lebih besar daripada minyak. Gas alam memiliki peranan penting pada energi dalam negeri beberapa negara dalam kawasan dan telah menjadi komoditi ekspor utama dari Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darusalam. Beberapa negara tersebut telah membuat upaya besar untuk mengembangkan industri gas alam. Penggunaan gas alam telah menjadi komponen utama dalam strategi swasembada energi dan diversifikasi bahan bakar. Potensi ini dimanfaatkan ASEAN dengan melakukan perdagangan lintas batas di bidang energi. Perdagangan lintas batas di bidang energi, khususnya gas dan listrik, memiliki jaringan yang lebih interkoneksi dengan menawarkan manfaat yang signifikan baik dari segi keamanan, fleksibilitas dan kualitas pasokan energi dan kompetisi yang lebih besar.

Pada tahun 1975, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) meyakinkan ASEAN untuk menciptakan dewan minyak bumi (juga dikenal sebagai Dewan ASEAN tentang Petroleum - ASCOPE) yang mengelola program berdedikasi terhadap mempromosikan dan mengkoordinasikan penelitian energi, dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan energi. Salah satu rencana yang diajukan oleh ASCOPE adalah Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) untuk menghubungkan infrastruktur gas di Asia Tenggara. Interkoneksi jaringan pipa gas nasional, yang dibangun melalui proyek *Trans-ASEAN Gas Pipeline* (TAGP) akan meningkatkan dan menjamin aksesibilitas dan ketersediaan energi di kawasan tersebut. Interkoneksi gas akan menyebabkan harga gas yang terjangkau dan dapat diakses oleh industri, bisnis dan penggunaan rumah tangga di seluruh ASEAN. Proyek *Trans-ASEAN Gas Pipeline* bertujuan untuk membangun interkoneksi gas yang lebih luas di seluruh kawasan, meskipun kemajuan telah diperlambat oleh kurangnya sumber gas alam dan persyaratan investasi yang besar (International Energy Agency, 2013).

¹ LNG (Liquefied Natural Gas) merupakan gas alam cair. Gas alam yang telah diubah menjadi cairan, hal ini dilakukan karena untuk menghemat ruang. Karena 610 kaki kubik gas alam dapat diubah menjadi 1 kaki kubik LNG.

Tingginya ketergantungan terhadap energi di luar kawasan seperti minyak bumi menyebabkan kawasan ini mudah terpengaruh terhadap situasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibentuklah kerja sama di bidang energi yang salah satunya adalah Trans ASEAN Gas Pipeline. TAGP dibentuk karena besarnya cadangan gas alam yang terdapat di kawasan Asia Tenggara yang mencapai hingga 227 triliun Kubik Kaki dan berpotensi besar untuk menggantikan peran minyak bumi dalam kegiatan industri di Asia Tenggara. Kerja sama ini kemudian diikuti oleh sepuluh negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama ini dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal di negara ini. Kondisi internal tersebut yaitu kegagalan program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan gas alam di dalam negeri, kondisi ekonomi nasional paska krisis tahun 1998, serta rendahnya tingkat konsumsi gas dalam negeri. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu adanya perubahan struktur pasar gas alam di dunia, perubahan kebijakan gas alam di Asia Timur termasuk Jepang dan munculnya kebijakan ketahanan energi ASEAN sebagai salah satu syarat penunjang pembentukan Komunitas ASEAN 2015.

TAGP juga menawarkan sejumlah manfaat bagi Indonesia seperti mendukung program pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, mempermudah pengiriman gas ke luar negeri, meningkatkan keamanan pasokan energi penunjang seperti listrik, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi efek perubahan lingkungan, dan meringankan pembiayaan proyek gas nasional. Ketersediaan dan akses ke gas alam pasti akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produktivitas, dan menyebabkan perubahan dalam kualitas hidup, perilaku sosial dan gaya hidup.

Tabel I.1.1 Produksi Gas Alam Negara Anggota ASEAN

Table 3.7 ▶ Gas production by country (bcm)

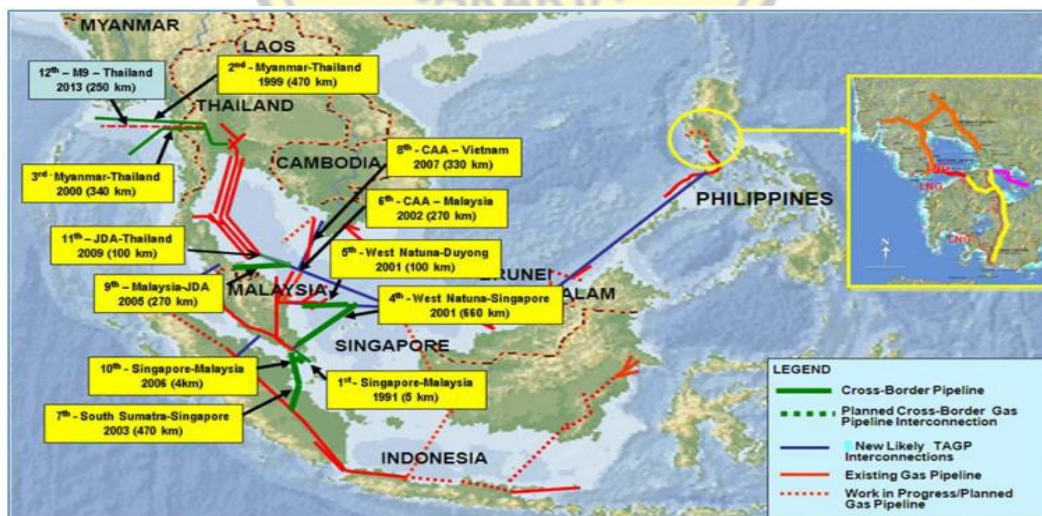
	1990	2011	2020	2025	2030	2035	2011-2035*
Brunei Darussalam	9	13	16	15	15	14	0.5%
Indonesia	48	81	108	118	129	139	2.3%
Malaysia	17	56	71	68	67	65	0.6%
Philippines	0	4	5	5	4	4	0.2%
Thailand	6	28	19	15	11	7	-5.5%
Vietnam	0	9	13	12	12	12	1.3%
Rest of ASEAN	1	12	18	19	21	22	2.6%
Total ASEAN	82	203	249	252	258	264	1.1%
<i>Share of world</i>	<i>4.0%</i>	<i>6.0%</i>	<i>6.3%</i>	<i>5.8%</i>	<i>5.6%</i>	<i>5.3%</i>	<i>n.a.</i>

* Compound average annual growth rate.

Sumber: Southeast Asia Energy Outlook 2013

Produksi gas di Asia Tenggara berkembang hingga lebih dari dua kali lipat selama dua dekade terakhir. Indonesia, Malaysia, Brunei dan pada tingkat lebih rendah Philipina, akan mendorong peningkatan lebih lanjut dalam produksi gas di Asia Tenggara pada periode ke tahun 2035.

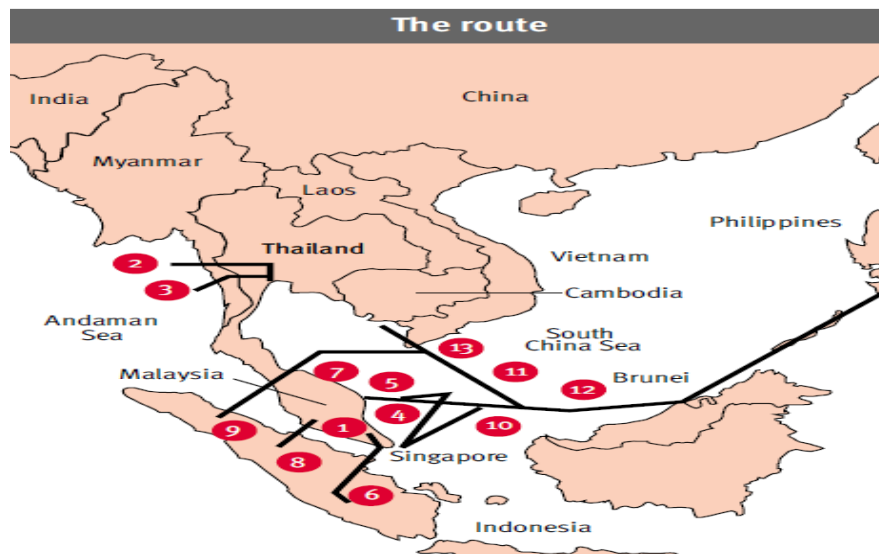
Gambar I.1.2 Peta Pipa Lintas Batas antar-Koneksi di ASEAN



Sumber: The Trans Asean Gas Pipeline

Berdasarkan gambar diatas interkoneksi penuh jaringan pipa gas tersebut diperkirakan oleh ASEAN harus terselesaikan pada tahun 2020, sehingga penciptaan jaringan gas akan saling berhubungan di seluruh kawasan ASEAN dan hubungan antara pusat permintaan dan produksi yang dibangun antara negara-negara mampu membangun perkembangan ekonomi seperti yang telah direncanakan.

Gambar I.1.3 Rute Jalur TAGP dalam Kawasan ASEAN



Sumber: Asia Pacific Review Trans Asian-Pipe

Berdasarkan gambar diatas rancangan pembangunan jalur energi TAGP yang menghubungkan kawasan ASEAN dilakukan secara bertahap dengan membangun infrastruktur pipa gas pada masing-masing negara yang akan disalurkan ke seluruh kawasan.

Pipa gas lintas batas pertama dalam ekspor gas di ASEAN dibangun dari Malaysia ke Singapura dan telah dioperasikan sejak tahun 1991. Jalur pipa gas selanjutnya dibangun dari Myanmar (Yadana) ke Thailand (Ratchaburi) dioperasikan pada tahun 1999. Rute pipa gas selanjutnya dibangun pada tahun 2000 membentang dari Myanmar (Yetagun) ke Thailand (Ratchaburi). Pada tahun 2001 dibangun jalur pipa gas dari Indonesia (Pulau Natuna Barat) ke (Singapura). Dan masih pada tahun yang sama yaitu tahun 2001 dibangun jalur pipa gas dari Indonesia (Pulau Natuna Barat) ke Malaysia (Duyong). Disusul pada tahun 2002 dibangun jalur pipa gas

lintas-batas dari Malaysia/Vietnam Commercial Arrangement Area (CAA) ke Malaysia dan pada tahun 2003 dibangun dari Indonesia (Sumatra Selatan) ke Singapura. Rute selanjutnya dibangun pada tahun 2005 membentang dari Malaysia menuju Thailand (*Joint Development Area*) dan Indonesia (Sumatra Selatan) menuju Malaysia. Pada tahun 2006 dibangun jalur pipa gas dari Singapura ke Malaysia. Sedangkan pada tahun 2007 dibangun jalur pipa gas dari Malaysia/Vietnam CAA ke Vietnam. Namun pada tahun 2009 dibangun jalur pipa gas dari JDA Thailand/Malaysia ke Thailand. Lalu tahun 2013, jalur pipa gas kembali dibangun dari Zawtika Block M9, Myanmar ke Thailand, dan yang terakhir pembangunan jalur pipa gas dibangun dari Block 17 (Thailand/Malaysia JDA) ke Kerteh, Terengganu, Malaysia pada tahun 2015. (*Building the Trans- Asean gas pipeline; Asia Pasific Review*).

Dengan adanya interkoneksi pipa gas alam yang telah dibuat dengan infrastruktur pipa di tempat, gas dapat diangkut terus menerus untuk konsumen yang berbeda dengan mudah. Dengan pasokan yang aman, menghindari pelanggan harus khawatir tentang fasilitas penyimpanan, dan memberikan pelanggan fleksibilitas dalam hal fluktuasi penggunaan sehari-hari.

Langkah ini diambil dalam rangka mengurangi ketergantungan negara ASEAN terhadap minyak karena rata-rata negara ASEAN mengimport minyak, kecuali Brunei Darussalam. ASEAN juga memiliki agenda untuk mempromosikan gas alam karena lebih bersahabat dengan lingkungan ketimbang minyak. Negara-negara exportir gas seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Myanmar diuntungkan dengan adanya akses untuk menjual gas ke berbagai negara. Sedangkan negara-negara importir seperti Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja dan Laos juga mendapat keuntungan karena dapat membeli dari satu sumber sehingga meminimalkan risiko kelangkaan. Daerah yang dilewati pipa pun akan mengalami perkembangan infrastruktur. Pada akhirnya dengan kerjasama ini diharapkan akan menguntungkan semua anggota ASEAN.

Indonesia, Malaysia, dan Brunei adalah eksportir LNG utama yang menampilkan beberapa fasilitas pencairan gas. Fasilitas regasifikasi² LNG dapat ditemukan di seluruh wilayah, bahkan di negara-negara penghasil gas, seperti Indonesia dan Malaysia. Hal ini terutama disebabkan geografi mereka tersebar pulau. Dalam hal ini, pengiriman LNG digunakan untuk menyalurkan gas alam dari ladang gas dalam negeri yang jauh dari pusat-pusat permintaan domestik. Fasilitas regasifikasi LNG, kemudian, hanya digunakan untuk meregasifikasi LNG dari pasokan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Indonesia menjadi salah satu produsen gas alam yang penting di kawasan. Kebanyakan pusat-pusat produksi gas Indonesia berlokasi di lepas pantai. Yang paling besar diantaranya ialah Arun (Aceh, Sumatera), Bontang (Kalimantan Timur), Tangguh (Papua), dan Pulau Natuna. Indonesia memproduksi sekitar dua kali lipat dari gas alam yang dikonsumsi, namun ini tidak berarti bahwa produksi gas domestik memenuhi permintaan gas domestik. Sebagian besar hasil produksi gas diekspor karena produksi gas negara ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang hanya bersedia untuk berinvestasi bila diizinkan mengekspor komoditi ini.

Tabel I.1.5 Produksi dan Konsumsi Gas Indonesia 2006-2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi dalam milyar m ³	74.3	71.5	73.7	76.9	85.7	81.5	77.1	72.1	73.4	75.0
Konsumsi dalam milyar m ³	36.6	34.1	39.1	41.5	43.4	42.1	42.2	36.5	38.4	39.7

Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2015

Seperti yang ditunjukkan di tabel di atas dan kontras dengan produksi minyak nasional - produksi gas di Indonesia tetap stabil, mencatat rekor tinggi di 2010 karena awal produksi Ladang Tangguh (berlokasi di Papua) di tahun yang sama (dimanajemen oleh BP Indonesia) yang merupakan sebuah ladang penting dalam

² Regasifikasi merupakan proses untuk memanaskan LNG. Sehingga memungkinkan LNG akan menguap kembali menjadi gas alam.

industri gas negara ini. Setelah 2010, produksi gas telah menurun karena masalah-masalah suplai.

Pada awalnya pemerintah Indonesia bertujuan membatasi ekspor gas negara ini. Tujuannya yaitu dalam rangka mengamankan suplai domestik sambil mendorong penggunaan gas alam sebagai sumber bahan bakar untuk konsumsi industri dan personal. Namun pembatasan ekspor gas alam tersebut tidak terlalu banyak memberikan penurunan yang signifikan terhadap jumlah gas alam yang harus diimpor dikarenakan oleh ketersediaan gas alam yang mampu diproduksi di dalam negeri semakin lama semakin terbatas serta arah kebijakan pengelolaan gas alam yang sudah lebih banyak memprioritaskan alokasi kebutuhan gas dalam negeri untuk kontrak-kontrak gas mendatang. Itulah yang menyebabkan gagalnya kebijakan ekspor untuk dilakukan.

Sementara itu kontrak-kontrak gas mendatang inilah yang menyebabkan setengah dari produksi gas Indonesia tidak cukup untuk memenuhi konsumsi gas domestik. Kontrak-kontrak gas mendatang inilah yang terkait adanya perusahaan asing atau Multi National Corporation (MNC) yang berinvestasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing yang mengeksplorasi gas alam Indonesia diantaranya ialah CNOOC Limited, Total E&P Indonesia, Conoco Philips, BP Tangguh, Exxon Mobil Oil Indonesia, Chevron, Kangean Energy Indonesia Ltd, dll. Semua perusahaan asing yang diizinkan berinvestasi dan melakukan eksplorasi di Indonesia akan mendapatkan Investment Credit³. Namun untuk mengatasi penurunan cadangan gas nasional, perusahaan gas Indonesia, Pertamina, hanya mendapatkan kontrak jangka panjang untuk membeli LNG dari AS dan tidak secara aktif terlibat dalam proyek-proyek gas hulu internasional (Southeast Asian Gas Outlook to 2045: Prospects of gas network expansion to increase security of supply, 2015 : 9).

Sejak tahun 2002 ASEAN telah mengumumkan rencana untuk membangun jalur pipa gas alam yang terintegrasi melalui proyek infrastruktur Trans Asean Gas Pipeline (TAGP) yang bertujuan untuk menghubungkan cadangan gas di teluk

³ Investment Credit merupakan bentuk insentif pemerintah kepada kontraktor migas di Indonesia dibandingkan negara lain.

Thailand, Myanmar dan Indonesia keseluruhan kawasan. Dan untuk membuka peluang pasar yang lebih luas lagi, sejak tahun 2002 Indonesia bersedia bekerjasama dalam TAGP. Pada dasarnya persiapan Indonesia dalam proyek TAGP sudah lebih maju dibanding di dalam negeri karena sesungguhnya jalur pipa dari Jakarta sudah terhubung dengan Singapura-Kuala Lumpur-Bangkok dan nantinya ke Filipina (bumn.go.id).

Berikut ini merupakan kontribusi-kontribusi yang dilakukan Indonesia dalam proyek TAGP yaitu dalam hal pembangunan pipa lintas batas terbagi menjadi dua yakni, pipa lintas batas yang dibangun dari Indonesia (Natuna barat) ke Singapura merupakan pipa lintas perbatasan ketiga di Asia Tenggara yang siap pada tahun 2001. Pada bulan Januari 1999 sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Sembawang teknik dan Construction Pte Ltd dari Singapura telah menandatangani US \$ 8000000000 kesepakatan dengan PERTAMINA Indonesia dan operator lapangan gas Natuna Barat Laut) Conoco, Premier Oil dan Gulf Resources) untuk pengiriman jangka panjang gas alam dari Indonesia ke Singapura. Berdasarkan perjanjian tersebut, Singapura mengamankan pasokan 22-tahun gas alam dari Natuna Barat Laut dengan volume harian 9.1 MMcm. Biaya proyek akan menjadi sekitar US \$ 118 per ton setara minyak. Gas akan disalurkan ke Singapura melalui pipa bawah laut dari ladang gas untuk Jurong Island dan didistribusikan ke kekuasaan dan perusahaan petrokimia. Pengiriman gas pertama terjadi pada bulan April 200. (Natural Gas Pipeline Development in Southeast Asia, 2000: 42-43).

Kontribusi selanjutnya yakni pipa lintas batas yang dibangun dari Indonesia (Sumatera selatan) ke Singapura. *Singapore Power* telah memulai negosiasi dengan PERTAMINA Indonesia untuk tambahan 5,6 MMCMD dari lapangan gas Asamera di Sumatera Selatan untuk pembangkit listrik, industri dan keperluan rumah tangga. Pipa transmisi 536 km telah dibangun menghubungkan ladang gas Asamera dan Duri, bersama-sama dengan 137 km loop untuk Sakerman. Dari Sakerman akan ada lagi saluran transmisi 370 km ke Batam, dan jaringan pipa distribusi 23 km ke Batam. Satu baris akan mengirimkan lebih 5,6 MMCMD ke Singapura, dijadwalkan untuk

pengiriman pada tahun 2002. (Natural Gas Pipeline Development in Southeast Asia, 2000 : 43).

Dengan demikian adanya beberapa jalur pipa perbatasan yang dibuat dari Indonesia ke beberapa negara di Asia Tenggara membuktikan betapa besarnya kontribusi Indonesia dalam proyek Trans Asean Gas Pipeline (TAGP). Peran negara-negara di Asia Tenggara dalam memberikan upaya pembangunan proyek TAGP terlancarkan dengan hadirnya peran Indonesia untuk memberikan bantuan pasokan energi gas yang dibutuhkan negara-negara non eskportir di ASEAN.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik satu pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penulis adalah “Bagaimana Peran Indonesia dalam Proyek Trans Asean Gas Pipeline (TAGP) periode 2010-2015?”

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketersediaan energi gas Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran Trans ASEAN Gas Pipeline di sektor energi gas.
3. Untuk memahami proses kerjasama regional antara Indonesia dengan ASEAN melalui proyek TAGP periode 2010-2015.
4. Untuk memahami Peran Indonesia dalam Proyek Trans Asean Gas Pipeline (TAGP) periode 2010-2015.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Akademis** adalah untuk memberikan informasi dan data di dalam jurusan Hubungan Internasional terkait ekonomi politik peran Indonesia dalam proyek Trans Asean Gas Pipeline.
2. **Manfaat Praktis** adalah dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses ekonomi politik dari peran Indonesia dalam proyek Trans Asean Gas Pipeline yang dilakukan oleh Indonesia dan Asean.

I.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, dalam tulisan Hassan Ibrahim yang berjudul “*Natural Gas Pipeline Development in Southeast Asia*”, yang diakses dari link: <http://bumn.go.id/pertamina/berita/0-Pertamina-NOC-ASEAN-Perkuat-Konektivitas-Energi>, pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 21:03 WIB menjelaskan bahwa setiap ekonomi di Asia Tenggara memiliki mekanisme kelembagaan dan peraturan sendiri sehubungan dengan eksplorasi gas alam, produksi, transportasi dan pemanfaatan.

Operasi dari pipa lintas perbatasan membutuhkan seperangkat aturan, peraturan dan struktur harga yang memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Sektor swasta bersama-sama dengan perusahaan minyak dan gas nasional (NOGCs) akan terus memainkan peran kunci dalam mengejar pembangunan proyek pipa lintas perbatasan.

Sementara pemerintah mengalami kendala sehubungan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, sektor swasta semakin mampu memberikan modal yang diperlukan untuk mengembangkan gas alam baru proyek infrastruktur dan jaringan perdagangan yang terkait di wilayah APEC. Peraturan pembangunan nasional harus memungkinkan kepemilikan pribadi fasilitas gas alam dan tugas keamanan kepentingan dalam aset.

Pemerintah memiliki peran penting untuk bermain untuk mendorong pengembangan pasokan gas alam dan infrastruktur transportasi. Pemerintah perlu membangun otonom regulator dengan kapasitas teknis, kekuatan pengambilan keputusan independen dan kekuatan untuk menegakkan peraturan untuk mengatur sektor gas alam dan memastikan bahwa pihak swasta dan publik diperlakukan secara adil.

Adanya manfaat interkoneksi pipa gas, gas dapat diangkut terus menerus untuk berbeda konsumen dengan mudah. Dengan pasokan yang aman, menghindari pelanggan harus khawatir tentang pembangunan saham atau fasilitas penyimpanan, dan memberikan pelanggan fleksibilitas dalam hal fluktuasi penggunaan sehari-hari. Selain itu, gas alam menawarkan tambahan keamanan pasokan energi ke wilayah tersebut. Jaringan pipa gas alam juga menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memindahkan gas dari lapangan ke pasar. Infrastruktur pipa adalah prasyarat untuk gas alam di Asia Tenggara untuk dikonsumsi lebih dalam negeri dan memainkan peran yang lebih besar dalam keamanan pasokan energi dari wilayah tersebut.

Kemudian harga merupakan faktor penting dalam kontrak gas, dan diformulasikan untuk memberikan manfaat bersama untuk semua pihak yang terlibat. Kebijakan harga gas alam di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh tujuan ekonomi dan sosial dari masing-masing ekonomi. Harga gas alam di Singapura dan Thailand jelas mencerminkan kondisi pasar. Malaysia dan Filipina secara bertahap mengadopsi harga pasar, meskipun masih memperhitungkan sosial pertimbangan. Di Brunei Darussalam, tujuan sosial memainkan peran penting dalam penentuan harga gas. Brunei Darussalam dan Indonesia memiliki rencana siap untuk perubahan bertahap untuk pasar. Berdasarkan harga, meskipun komitmen yang tersisa untuk keadilan sosial dalam kebijakan energi mereka.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini ialah untuk menilai cadangan gas terbaru dan memberikan anggota ekonomi Asia Tenggara skenario terbaru tentang pembangunan infrastruktur gas alam di wilayah tersebut, untuk menyoroti isu-isu

kelembagaan dan peraturan sehubungan dengan industri gas alam di Asia Tenggara, dan untuk mengeksplorasi pengembangan jaringan TAGP, yang terbentuk secara bertahap dengan pembangunan jaringan pipa lintas batas, dengan jaringan penuh yang ditetapkan dengan menghubungkan dari garis-garis batang utama dengan pipa lateral.

Dalam penelitian ini membahas tentang pembangunan pipa gas alam di Asia Tenggara dari sektor transmisi gas, kebijakan gas alam, harga gas alam dan kebijakan harga gas dimana setiap negara Asia Tenggara memiliki kriteria sendiri dalam menentukan harga gas, maka penelitian penulis lebih difokuskan kepada pembangunan pipa gas alam dari Indonesia ke beberapa negara importir dalam proyek Trans Asean Gas Pipeline.

Kedua, dalam tulisan Dwiky Larasaty yang berjudul "Meninjau Strategi Keamanan Energi ASEAN Melalui TAGP Menuju Interaksi Global", yang diakses dari artikel Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, menjelaskan bahwa Asia Tenggara memiliki sumber daya gas alam yang melimpah, ASEAN memanfaatkan potensi besar kekayaan alam dan letak geografis yang strategis dengan membangun proyek *Trans-ASEAN Gas Pipeline* guna mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam kawasan. Potensi ini dimanfaatkan ASEAN dengan melakukan perdagangan lintas batas di bidang energi.

Semakin berkembangnya total produksi dan konsumsi gas alam di kawasan ASEAN melalui proyek TAGP membutuhkan pengamanan khusus agar keamanan jaringan saluran energi dapat tetap terjaga. Dalam rancangan proyek TAGP pengertian sederhana dalam menjelaskan keamanan energi adalah untuk membuat akses yang aman pada bahan bakar. Intervensi otoritas negara dalam pengelolaan dan distribusi energi dibenarkan dalam hal 'keamanan energi', yakni dengan memastikan bahwa insentif yang tepat dan instrumen kebijakan digunakan untuk mendorong perusahaan swasta untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk memproduksi dan menyalurkan pasokan energi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bangsa. Keamanan energi mengkolaborasikan dimensi kebijakan luar negeri yang signifikan dalam hal menjaga hubungan baik dengan investor asing; negara-negara juga melakukan proteksi terhadap ancaman pengiriman pasokan energi lintas-batas

dengan keputusan mempekerjakan kekuatan militer dalam perlindungan rute pasokan luar negeri.

Untuk memastikan stabilitas pasokan gas alam, ASEAN mendorong koordinasi untuk mengatasi potensi ancaman dan kerentanan dari risiko gangguan atau kecelakaan pada jaringan pipa gas alam terbesar. Proyek TAGP memenuhi gagasan keamanan energi karena secara bersamaan meningkatkan akses ke pasokan gas alam dan memfasilitasi kerjasama operasi dan pemeliharaan jaringan pipa lintas perbatasan dalam kawasan.

Pembangunan proyek TAGP telah memberikan dampak yang signifikan pada integrasi pasar gas regional ASEAN secara keseluruhan. Efisiensi energi dalam kawasan dapat terlihat dari beberapa keuntungan pada integrasi pasar gas alam, diantaranya: (1) Menambah pasokan keamanan energi dan mempromosikan diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak; (2) Membuat keuntungan dan memaksimalkan nilai kelebihan sumber daya gas alam di wilayah tersebut (contoh: Myanmar dan Indonesia); (3) Meningkatkan penghasilan pendapatan asing untuk negara pengekspor gas (misalnya untuk Myanmar dan Indonesia); (4) Menciptakan infrastruktur atau pasar gas lokal dan memutar perekonomian industri di kawasan; (5) Mempromosikan penggunaan gas alam sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan; dan (6) Mempromosikan kerja sama regional untuk meningkatkan keamanan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi asing.

Pembangunan proyek TAGP dijadikan sebagai suatu instrumen strategi keamanan energi ASEAN untuk dapat bersaing dalam pasar gas alam luar kawasan. Adapun kebijakan energi ASEAN dibangun berdasarkan kombinasi dari berbagai perjanjian, deklarasi kebijakan, dan kesepakatan Konverensi Tingkat Tinggi (KTT). Dalam realisasinya terdapat beberapa poin utama yang menjelaskan gambaran strategi keamanan energi melalui TAGP, diantaranya:

(1) The 1998 Hanoi plan of action - Rencana Hanoi diadopsi pada KTT ASEAN Keenam dan menyerukan negara-negara anggota untuk melaksanakan inisiatif untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan pasokan energi, pemanfaatan

sumber daya energi regional yang efisien dan manajemen rasional permintaan energy, (2) Pasokan energi - ASEAN meliputi wilayah yang kaya akan sumber daya energi, dengan cadangan terbukti agregat sekitar 27 milyar barel minyak dan 350tr kaki kubik gas, khususnya di bidang pasokan utama Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Thailand, dan (3) Interkoneksi - Kedekatan relatif dari konsentrasi permintaan dan prospek sumber pasokan dalam ASEAN, negara anggota bersama-sama menganjurkan pembenaran untuk menciptakan jaringan energi regional yang lebih baik.

Strategi keamanan energi ASEAN menggunakan jalur TAGP untuk mencukupi kebutuhan konsumsi energi dalam kawasan, pada tahap berikutnya ketersediaan energi yang berlebih akan diedarkan dengan memanfaatkan interkoneksi jaringan pipa gas untuk mengekspor gas alam guna memenuhi kebutuhan energi global khususnya di kawasan Asia Pasifik. Hubungan interdependensi ekonomi dan kebutuhan energi antar ASEAN dan Asia Pasifik mulai terbangun melalui adanya interkoneksi jalur penyediaan energi diluar kawasan. Momentum proyek TAGP dimanfaatkan ASEAN untuk menjalin jaringan penyaluran energi yang lebih luas. Beberapa jaringan pipa dari Myanmar, Laos atau Vietnam berpotensi meluas ke provinsi-provinsi Yunnan di China selatan atau Guangxi-Yunnan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama ekonomi ADB Sub Region Program. Selain perluasan ekspor penyediaan energi ke Cina, jalur TAGP juga memungkinkan untuk mengedarkan pasokan gas alam menuju Jepang dan Korea.

Pada akhirnya strategi ASEAN dengan TAGP mampu mendorong hubungan interdependency ekonomi Asia Tenggara melalui ekspor gas alam di kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini difokuskan pada upaya keamanan energi proyek TAGP di kawasan ASEAN yang memiliki prospek yang besar dalam kemajuan kawasan Asia Tenggara menuju interaksi global. Strategi keamanan energi yang diterapkan fokus pada penyediaan energi gas alam terbarukan, membangun integrasi pasar gas alam regional, dan membentuk interkoneksi jaringan pipa gas yang dapat disalurkan lebih meluas di kawasan Asia Pasifik.

Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan hampir sama karena berkaitan dengan ketersediaan energi gas, namun yang menjadi pembeda ialah jika dalam artikel ini membahas mengenai strategi keamanan energi ASEAN menuju interaksi global khususnya memungkinkan sampai ke Asia Pasifik, namun dalam penelitian penulis lebih memfokuskan kepada ketersediaan gas alam Indonesia yang juga membutuhkan pengamanan khusus agar keamanan jaringan saluran energi dapat tetap terjaga dalam pembangunan proyek TAGP.

Ketiga, dalam tulisan dari Yuliana yang berjudul “*Southeast Asian Gas Outlook To 2045: Prospects Of Gas Network Expansion To Increase Security Of Supply*”, yang diakses dari Jurnal Faculty of Technology, Policy and Management - Delft, University of Technology, the Netherlands, menjelaskan tentang model jaringan infrastruktur gas di Asia Tenggara. Penggunaan model adalah untuk mengevaluasi kemampuan infrastruktur TAGP dan LNG rencana induk untuk memenuhi permintaan gas alam di Asia Tenggara sampai 2045.

Menurut skenario BAU, produksi gas Indonesia akan menurun setelah tahun 2017. Akibatnya, kapasitas regasifikasi baru diperlukan untuk menangani impor LNG. Singapura dan Thailand juga harus meningkatkan kapasitas regasifikasi mereka, terutama setelah persediaan pipa gas dari Indonesia dan Myanmar berhenti karena berakhirnya kontrak. Kebutuhan ini telah tidak ditangkap pada rencana ekspansi infrastruktur LNG saat ini. Dalam skenario referensi, sebagai produksi gas domestik Indonesia akan memiliki pertumbuhan yang positif, Indonesia tidak perlu tambahan regasifikasi kapasitas untuk menangani impor LNG. Dalam skenario referensi, itu akan mungkin untuk Indonesia untuk ekspor gas ke Singapura melalui pipa gas yang ada, misalnya Sumatera Selatan-Singapura dan Natuna Barat-Singapura, atau memperpanjang koneksi dari Natuna Timur ke Natuna Barat-Singapura pipa gas.

Indonesia juga bisa ekspor gas ke Thailand dengan membangun pipa gas dari Natuna Timur ke Erawan seperti rencana TAGP. Gas lainnya diusulkan pipa koneksi, yaitu ke Malaysia. Sedangkan adanya keamanan pasokan atau keuntungan maksimalisasi (dari perspektif Indonesia) ialah tujuan utama dari kontraktor atau

perusahaan-perusahaan gas adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Untuk Indonesia pemerintah sebagai tuan rumah atau pemilik ladang gas, kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan gas alam untuk kebutuhan domestik ini juga penting, dan dengan demikian pemerintah harus mengamankan pasokan jangka panjang gas alam.

Berikut kebijakan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, yaitu pertama, Pemerintah Indonesia harus menunda rencana untuk meliberalisasi pasar gas nasional karena pasar gas di Indonesia belum matang. Infrastruktur gas hilir masih kurang dan dengan demikian, persyaratan untuk unbundling akan hanya memperlambat infrastruktur hilir pembangunan. Ini akan berpotensi menghambat rencana pemerintah untuk memperbesar pasar gas domestik. Sebagai hasilnya, pertumbuhan konsumsi dalam negeri mungkin jauh lebih sedikit daripada prediksi.

Namun, jika pemerintah Indonesia terpaksa meliberalisasi (yaitu eksternal politik atau ekonomi tekanan), prioritas utama harus mengembangkan infrastruktur gas hilir pertama, diikuti oleh reformasi lembaga atau peraturan. Kedua, Pemerintah harus hati-hati mengelola PSC yang struktur (perdagangan antara keamanan pasokan dan maksimalisasi keuntungan) terutama pada proyek lokasi sulit dimana perusahaan milik negara, yaitu Pertamina, tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan bidang (misalnya lapangan gas Natuna Timur). Konsorsium dapat mendukung Pertamina untuk memperoleh teknologi pembelajaran dari perusahaan multi-nasional gas lain di konsorsium.

Dalam penelitian ini menggunakan teori interdependency dimana dijelaskan bahwa tingkat interdependency masing-masing negara bisa diukur sebagai rasio dari produksi gas domestik untuk yang konsumsi gas domestik. Ini bisa menjadi indikator keamanan persediaan gas satu negara tertentu berdasarkan kemampuan produksi gas domestik untuk menghadapi kebutuhan gas domestik. Dan berdasarkan hasil sebelumnya produksi gas dan konsumsi dalam negeri, termasuk perdagangan gas baik melalui pipa atau pengiriman LNG.

Pembahasan dalam penelitian ini juga searah dengan penelitian yang penulis lakukan karena dalam penelitian penulis juga akan membahas mengenai tingkat

ketergantungan negara-negara ASEAN dalam mengimpor gas alam yang merupakan SDA yang ramah lingkungan dari Indonesia. Dan dengan adanya sifat ketergantungan ini bisa dijadikan peluang bagi Indonesia dalam meraih keuntungan di pasar energi ini.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 *Energy Security* (Keamanan Energi)

Gagasan tentang keamanan energi bergantung pada perspektif: pilihan sementara yang kita buat dan cara kita menyeimbangkan keamanan nasional, ekonomi dan lingkungan. (Carlos Pascual, 2010: 2).

Terlepas dari banyaknya elemen yang ada dalam keamanan energi, beberapa ahli kebijakan nampaknya sependapat bahwa fokus keamanan energi terdapat pada adanya ketersediaan energi dan kejangkauan harga. Seperti menurut IEA (*International Energy Agency*), sebuah organisasi energi internasional yang di bangun pasca *oil shock*, keamanan energi adalah ketersediaan energi yang taterganggu dalam rentang harga yang terjangkau (*International Energy Agency* 2010).

Definisi tradisional keamanan energi telah menyertakan ketersediaan, keandalan, dan keterjangkauan (Daniel, 2006). Jika konsep keamanan energi menggabungkan empat elemen yang disarankan di atas — ketersediaan, keandalan, keterjangkauan dan keberlanjutan layanan energi — hal ini bermanfaat untuk mempertimbangkan apakah semua negara mengevaluasi kerentanan dan kewananan energi identik prioritasnya. (Carlos Pascual, 2010: 130).

Strategi keamanan energi ASEAN menggunakan jalur TAGP untuk mencukupi kebutuhan konsumsi energi dalam kawasan. Implementasi strategi keamanan energi ASEAN akan semakin baik jika didukung dengan ketersediaan cadangan gas alam tertentu dan berlimpah, pasar yang stabil, permintaan persediaan

energi terbarukan terus mengalami peningkatan, dan secara konsisten menghormati upaya sosial dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

I.6.2 Kerjasama Regional

Mengusung pengenalan teori yang dikembangkan oleh Keohane dimana kerja sama internasional yang terbuka dalam konsep institusi tersebut bersambungan dengan aturan formal dan informal. Konsep ini yang menjelaskan peran kebiasaan, aktivitas yang konsisten dan ekspektasi yang terbentuk. Ketiga hal dalam institusi internasional yang dimaksud adalah *Formal Intergovernmental*, *international regimes*, dan *Conventions*. Sementara penggunaan konsep yang ditekankan bagi penulis ialah konsep utama yang diusung Keohane yakni *Formal Intergovernmental*. (Paul Bioti dan Mark Kauppi, 2010; 133-135).

Konsep ini menggabungkan tujuan yang sama, organisasi birokratis melalui aturan yang eksplisit beserta misi. Untuk mendalami konsep tersebut lebih dalam Neoliberal Instutisionalisasi menurut Keohane tidak berformulasi untuk menggabungkan organisasi formal dan rezim. Neoliberal instutisional sendiri mengantarkan nilai-nilai kebebasan liberal yang tidak dihantarkan oleh penulisan Neorealis dalam studi hubungan internasional. Dalam kata lain, seni dari kerja sama mampu dilihat dari institusi yang membantu untuk mendefinisikan arti dan kepentingan dari aksi negara.

Tembakkan utama Keohane dalam teori institusi berada dalam *Power and Interdependence* dimana beliau bersama Nye menjanjikan organisasi internasional sebagai bentuk dari rezim perubahan. Dalam membahas konsep ini lebih lanjut, kekuasaan negara harus diambil secara serius dan diasumsikan bahwa setiap pemimpin dalam negara berkalkulasi untuk menciptakan biaya dan keuntungan dari setiap aksi yang dikeluarkan. Yang akhirnya, Keohane mampu membagi pendapat Neorealis sebagai ketertarikan dan aplikasi teori ekonomi hubungan internasional bersama pengaruh pasar.

Dengan premis tersebut sebagai awal, Keohane menjelaskan teka teki untuk mengapa disebut sebagai *self interested*, *rational egoists*, *individual seeking to*

maximizing gains, yang mengantarkan terciptanya kerja sama multilateral atau khususnya dalam penelitian ini disebut sebagai regional. Neo liberal sebagai *grand theory* dalam kerja sama regional menghantarkan pengertian Realis tidak akurat sebagaimana Realis tidak mampu untuk menjelaskan kebijakan Amerika Serikat terhadap Eropa atau Jepang dimana Amerika secara agresif mempromosikan perbaikan ekonomi dan pembangunan.

Setelah semua preposisi dalam teori hubungan internasional, pernyataan-pernyataan dibentuk dalam fleksibilitas. Namun kondisi dari fungsi neoliberal sendiri mencegah aturan dan ekspektasi. Negara menggunakan institusi internasional sebagai *self interest reasons*. Sementara Keohane beranggapan ketertarikannya akan perdagangan, pembelaan, dan isu energi mengambil peran penting didalam *self interest* negara tersebut.

Secara umum, kerjasama regional merupakan kerjasama antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan yang memiliki tujuan yang sama. Kerjasama ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Aktivitas kerjasama regional antar negara (*regional interstate co-operation*) yang menunjukkan interdependensi termasuk negosiasi-negosiasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional. Aktivitas tersebut meliputi negosiasi, konstruksi, kesepakatan, dimana kerjasama tersebut bisa bersifat formal dan informal.

Kerjasama regional merupakan kegiatan yang dilakukan antara dua negara atau lebih yang berada dalam suatu kawasan dengan membuat perjanjian-perjanjian yang telah disepakati demi terciptanya suatu tujuan bersama. Kerjasama yang dilakukan dapat berupa kerjasama ekonomi, keamanan, politik dan sosial (Holsti&Tahrir, 1998:210). Kerjasama regional menurut pendapat K.J. Holsti dan Hans J. Morgenthau merujuk bahwa suatu kawasan yang definisikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis dan struktur masyarakat karena berada pada satu wilayah tertentu. Dengan adanya kebutuhan dalam memenuhi kepentingan nasional dalam hal sumber daya maka interdependensi

menjadi sebuah kecenderungan yang tidak dapat dipisahkan antar negara satu kawasan. Dari sinilah muncul sebuah keinginan bersama yang terdapat dalam satu *region* untuk dapat menyelesaikan isu-isu yang bisa mengganggu stabilitas di kawasan.

Proyek Trans Asean Gas Pipeline merupakan proyek pipa gas bawah laut dimana proyek ini dibuat melalui kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan ASEAN melalui proyek Trans Asean Gas Pipeline ini merupakan kerjasama regional yang telah dilakukan dengan baik.

I.6.3 Trans Asean Gas Pipeline (TAGP)

Trans Asean Gas Pipeline (TAGP) merupakan sebuah proyek infrastruktur energi fisik untuk mendukung peluang pasar baru, serta untuk meningkatkan keamanan energi antara negara-negara ASEAN. (Building The Asean Community, 2015). TAGP difokuskan untuk keamanan jangka panjang pasokan energi dalam wilayah serta ketersediaan dan kehandalan.

Berdasarkan ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) TAGP Masterplan pada tahun 2000, TAGP akan menggabungkan berbagai proyek-proyek individu, melibatkan konstruksi sekitar 4.500 kilometer pipa, terutama bawah laut, senilai sekitar USD 7 miliar. Proyek TAGP menyediakan kesempatan untuk keterlibatan sektor privat dalam hal investasi, termasuk pembiayaan dan transfer teknologi. Selain itu, jaringan pipa gas menawarkan manfaat yang signifikan, baik dari segi keamanan, fleksibilitas dan kualitas pasokan energi.

TAGP didasarkan pada integrasi yang ada dan ditujukan pada interkoneksi pipa ke dalam grid satu jaringan regional. (Asia Pacific Review, 2003). Jaringan pipa gas yang ada antara negara-negara ASEAN yang didasarkan pada pengaturan bilateral antara dua negara dengan tidak ada jaringan pipa yang melewati negara transit. Akibatnya belum diperlukan di masa lalu untuk mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan transit di negara ketiga, tetapi isu-isu tersebut akan perlu

dipertimbangkan dalam waktu dekat sebelum benar-benar terintegrasi jaringan dapat direalisasikan.

I.6.4 Teori Peran Negara

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan yang kebetulan dipegang aktor politik. Sedangkan negara merupakan satu-satunya institusi yang dapat berfungsi untuk mengenal krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara dengan membatasi distorsi pasar dimana meniadakan ketidakstabilan yang melekat dalam sistem ekonomi pasar.

Peran negara dapat dikatakan sebagai “capitalist development state” yang berperan dalam menjaga agar kebebasan pasar dan tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi internasional bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara bangsa di dunia era globalisasi sekarang ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara tersebut di dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut.

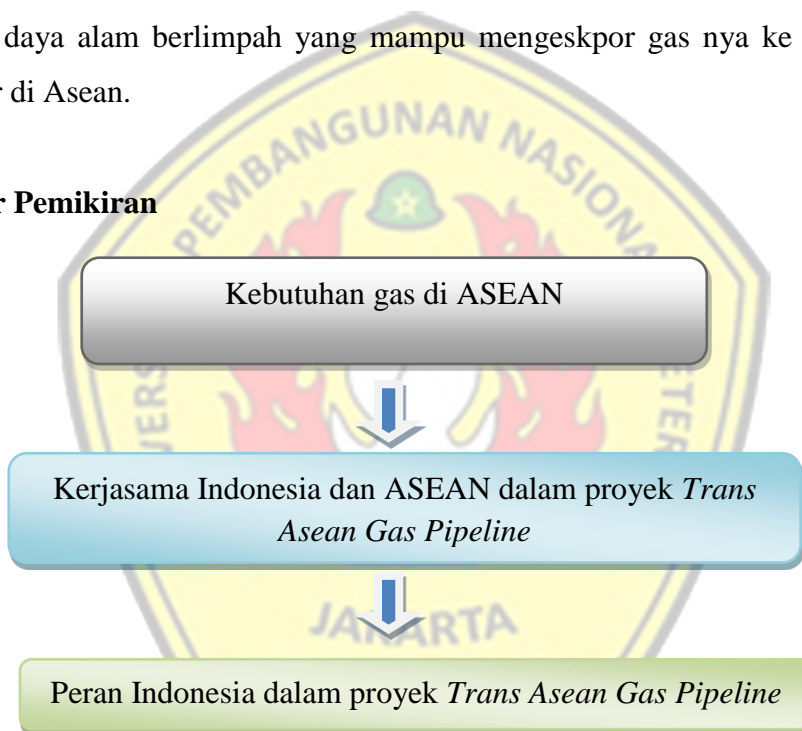
Menurut Kamal Mathur peran negara dalam pembangunan dapat dirinci dalam tiga perkara. Pertama dalam hal investasi. Pemerintah mengeluarkan bermacam kebijakan agar dapat menarik sebanyak mungkin investor supaya masuk kedalam negeri. Misalnya, jaminan investasi asing akan aman, bebas pembayaran bagi keuntungan investor, dan infrastruktur yang memadai. Kedua, bidang perdagangan. Misalnya, kebijakan bea ekspor murah, bea impor yang tinggi, dan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Dan terakhir dalam hal keuangan, seperti penanganan masalah inflasi.

Setidaknya ada tiga alasan untuk mendukung peran negara dalam hal pembangunan. Pertama sebagai media penanganan kegagalan pasar. Pasar bisa saja gagal dalam menentukan harga-harga faktor produksi, sehingga pemerintah harus turut campur dalam hal ini. Kedua, memobilisasi sumber dan dalam rangka alokasi

sumber-sumber daya tersebut. Negara berkembang memiliki masalah kelangkaan sumber daya, dan untuk menyelesaikannya, pemerintah harus dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas.

Pada dasarnya program Trans Asean Gas Pipeline (TAGP) yang telah dibentuk dari tahun 1989 ini merupakan keterlibatan Indonesia yang memiliki peran negara yang mendukung adanya pengurangan bahan bakar minyak dan diganti menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan yaitu gas alam. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki andil besar karena perannya sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam berlimpah yang mampu mengeskpor gas nya ke negara-negara importir di Asean.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

1. Peningkatan permintaan energi gas ASEAN melibatkan peran Indonesia dalam kegiatan ekspor gas ke negara-negara Asia Tenggara.
2. Indonesia berupaya mendominasi pasar gas melalui proyek *Trans Asean Gas Pipeline*.

I.9 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menganalisis keakuratan peristiwa suatu variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dengan daerah generalisasi yang luas. Penelitian ini pada dasarnya menguji hipotesis yang diajukan melalui teori. Kebenaran dalam penelitian ini diperoleh melalui deskripsi akurat tentang suatu variabel dan hubungan antar variabel meskipun dalam deskripsi dan generalisasi ini tidak digunakan angka-angka dan tidak bebas konteks.

I.9.1 Pendekatan penelitian

Dalam menunjang penelitian ini digunakan pendekatan yang kualitatif dimana pendekatan tersebut tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih kepada mementingkan kedalaman datanya. Secara harfiah, metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014; 13). Penelitian tentang kerjasama Indonesia-ASEAN ini dilakukan dengan cara mengembangkan bahan serta dokumen-dokumen yang berfokus kepada peran Indonesia dari kerjasama yang dilakukan dengan ASEAN khususnya dalam Proyek Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP) .

I.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan lebih menggunakan kepada kualitatif eksploratif dengan menggali informasi dan data yang ditemukan menjadi sebuah analisa yang memberikan sebuah hasil analisa baru yang original dari penulis.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dimana penulis menggunakannya untuk mendapatkan data-data primer serta sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen resmi di tingkat Nasional maupun Internasional, dalam situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (<https://www.esdm.go.id/index.html>), website resmi World Energy Outlook (<https://www.worldenergyoutlook.org>), dan website resmi ASEAN (<https://www.asean.org>). Selain itu, data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak ASEAN Centre for Energy. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui proses membaca, memahami, membandingkan, serta menganalisa beberapa literatur, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dalam koran, dan media internet serta data-data lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan ialah data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis yakni tentang proyek Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP) periode 2010-2015.

I.9.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisa untuk menarik kesimpulan yang bersifat *analitik*. Teknik analisis data *deskriptif-analitik* dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang mendukung argumen penulis dalam menganalisis masalah. Sedangkan analisis data yang sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasikan dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian.

I.10 Sistematika Penulisan

Studi ini dirancang untuk menjelaskan kerangka dan metodologi yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Hal tersebut disusun ke dalam:

BAB I. : Pendahuluan.

Bab ini membahas latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Proyek Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP) periode 2010-2015.

Bab ini akan membahas secara mendalam tentang latar belakang terbentuknya TAGP, proses kerjasama Indonesia dalam proyek TAGP, potensi cadangan gas Indonesia, serta kepentingan dan keuntungan Indonesia.

BAB III : Peran Indonesia dalam proyek Trans Asean Gas Pipeline (TAGP) periode 2010-2015.

Bab ini akan membahas mengenai peran Indonesia dalam meningkatkan ekspor gas nya ke negara-negara importir di Asia Tenggara setelah adanya pembangunan jalur pipa gas pada tahun 2001-2003 dan 2005, negosiasi proyek pembangunan saluran gas baru, faktor internal dan eksternal proyek TAGP, dan penjelasan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi Asean dalam proyek TAGP, serta peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proyek TAGP.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian dan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan.